

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pejabat di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan kembali Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada masing-masing unit organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada unit organisasi di Inspektorat, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Direktorat Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan, Direktorat Pengembangan Sistem Katalog, Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Direktorat Pengembangan Profesi, Direktorat Pelatihan Kompetensi, Direktorat Sertifikasi Profesi, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I, Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah II, dan Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : 1. PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3) rancangan Kontrak.
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. menyetujui bukti pembelian dan/atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
  - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengusulkan kepada PA/KPA:
- a. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
  - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
  - c. menetapkan tim pendukung;
  - d. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
  - e. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- KETIGA : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan spesimen tanda tangan dan paraf PPK pada unit organisasi pada tiap-tiap organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan ketentuan bahwa tanda tangan dan paraf PPK dianggap tidak sah apabila tidak sesuai dengan spesimen tanda tangan dan paraf PPK yang tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : PPK yang lama tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN  
 PENGADAAN BARANG/JASA  
 PEMERINTAH SELAKU KUASA  
 PENGGUNA ANGGARAN  
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
 PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT  
 ORGANISASI DI LEMBAGA  
 KEBIJAKAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 13 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 3 Maret 2017

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN  
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Nama/NIP/Jabatan Struktural	Jabatan Penugasan
1.	Angga Widita Amirul, S.E. NIP. 19840726 201012 1 001 Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Inspektorat
2.	Yasip Khasani, S.IP, M.M. NIP. 19741219 199703 1 005 Kepala Bagian Program dan Anggaran	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
3.	Arso Hadi Wardono, S.E. NIP. 19821216 201012 1 001 Kepala Subbagian Pemantauan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
4.	Jhon Piter Halomoan Situmorang, Ak., M.Ak. NIP. 19670101 198703 1 001 Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
5.	Ari Sulindra, S.T., M.T NIP. 19790125 200212 1 004 Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Umum dan Keuangan
6.	Moch. Zaini, SAP NIP 19600520 198502 1 001 Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Umum dan Keuangan
7.	Selamet Budiharto, Ak. NIP 19680223 198903 1 001 Kepala Bagian Sistem Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Umum dan Keuangan

8.	Andi Susanto, S.STP., M.Sc. NIP. 19790513 199711 1 001 Kepala Bagian Hukum dan Humas	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
9.	Selamet Budiharto, Ak. NIP. 19680223 198903 1 001 Kepala Bagian Sistem Informasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
10.	Tjipto Prasetyo Nugroho, Ak. NIP. 19670517 198803 1 001 Kepala Bagian Kepegawaian	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
11.	Imam Arumsyah, S.E. NIP. 19821125 201012 1 001 Kepala Seksi Jasa Konsultasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
12.	Agita Marelia Ulfa, S.H. NIP. 19780721 200502 2 001 Kepala Seksi Perencana dan Pengawas Konstruksi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
13.	Erwin Sondang S, S.STP., M.Si. NIP. 19800614 199810 1 001 Kepala Subdirektorat Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
14.	Ketsia Aprilianny Laya, S.T.P NIP 19850416 201012 2 001 Kepala Seksi Pertahanan Keamanan dan Keadaan Khusus	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
15.	Jochanan Setyo Adhi Nugroho, S.E. NIP. 19840503 201012 1 001 Kepala Seksi Pengembangan Pelaku Usaha	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
16.	Deasy Rachmawati, S.E. NIP 19791231 201012 2 001 Kepala Seksi Bilateral	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
17.	Tito Sulisty, S.E. NIP. 19820208 201012 1 001 Kepala Seksi Perencanaan Pengadaan Pemerintah Daerah	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan
18.	Himawan Giri Dahlan, S.Sos NIP. 19820822 201012 1 001 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pengadaan

19.	Eko Rinaldo Octavianus, SE, ME NIP. 19691014 199603 1 001 Kepala Subdirektorat Riset dan Kontrak	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
20.	Drs. Dwi Satrianto NIP. 19651108 199703 1 001 Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
21.	Sugianto, S.T NIP. 19820408 201012 1 001 Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
22.	Donald Sutanto Panjaitan, S.T., M.SE., M.Sc. NIP. 19770515 200502 1 001 Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
23.	Ria Agustina Nasution, S.E., M.E. NIP. 19680829 199503 2 001 Kepala Subdirektorat Pengembangan Pengelola Pengadaan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Profesi
24.	Januar Indra, ST NIP. 19770103 200502 1 003 Kepala Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pengembangan Profesi
25.	Ichwan Makmur Nasution, M.Sc. NIP. 19750625 200212 002 Kepala Subdirektorat Sumberdaya Pembelajaran	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pelatihan Kompetensi
26.	Wisnu Setyo Wijoyo, S.T., M.M. NIP. 19690413 199903 1 008 Kepala Subdirektorat Program Pelatihan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Pelatihan Kompetensi
27.	Muhammad Firdaus, S.E., M.M. NIP. 19770202 200501 1 004 Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Sertifikasi Profesi
28.	Miftah Irfaniah, S.Pd.I, M.Pd. NIP 19821221 201012 2 001 Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Sertifikasi Profesi

29.	Ranto, SP NIP. 19771123 200212 1 005 Kepala Subdit Wilayah I Barat	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I
30.	Muhamad Dwi Sumanto, S.Sos NIP. 19870319 201012 1 001 Kepala Seksi Wilayah Bali, Nusa Tenggara & Pusat	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah I
31.	Ir. Irawaty Imran, M.T. NIP. 19600518 199603 2 001 Kepala Subdit Wilayah II Timur	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah II
32.	Mudjisantosa, S.E., M.M. NIP. 19680616 198901 1 001 Kepala Subdit Keterangan Ahli	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertugas di Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum

SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttt

SALUSRA WIDYA